

Katalog : 3205008.3317

ANALISIS KEMISKINAN *dan* PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REMBANG**

ANALISIS KEMISKINAN *dan* PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG 2016



ANALISIS KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG 2016

Nomor Publikasi : 33172.1725
Katalog : 3205008.3317
Ukuran Buku : A4 (8,27 inch x 11,69 inch)
Jumlah Halaman : xiii + 57 halaman

Naskah :

Seksi Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

Pengarah : Amirudin, S.Si, MMSI
Penanggung Jawab : Amirudin, S.Si, MMSI
Penyunting : Khaerul Anwar, S.S.T
Penulis : Faisal Luthfi Arief, S.S.T

Gambar Kulit :

Faisal Luthfi Arief, S.S.T

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

ABSTRAK

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia, termasuk di Kabupaten Rembang. Sebab ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial, termasuk kemiskinan dan pengangguran.

Data yang digunakan dalam publikasi “Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2016” berasal dari Survei Sosial Ekonomi (Susenas) dan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) periode tahun 2012-2016 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang. Publikasi ini hanya membahas pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang selama tahun 2012-2016 cenderung mengalami perlambatan dari 5,32 persen menjadi 5,23 persen, meskipun sempat mengalami percepatan pada tahun 2013 dan 2015. Selama itu angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan dari 21,88 persen menjadi 18,54 persen. Sedangkan ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan gini rasio mengalami fluktuasi, namun selama periode tahun 2011-2015 terakhir masih tergolong rendah.

Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang dapat mengurangi angka kemiskinan. Sementara itu hubungan antara tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan tidak selalu berjalan searah selama periode tahun 2011-2015.

Distribusi pendapatan yang merata dan penurunan angka kemiskinan merupakan kewajiban pemerintah dalam upaya menuju keberhasilan pembangunan. Tetapi masyarakat secara keseluruhan, termasuk penduduk miskin, juga harus diikutsertakan dan menyadari bahwa mereka juga salah satu subjek dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

KATA PENGANTAR

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, tak terkecuali Indonesia. Persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat Kabupaten Rembang. Sehubungan hal di atas, maka Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang menyajikan publikasi “**Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2016**”.

Publikasi ini berisi tentang data dan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan distribusi pendapatan dan indikator lain yang terkait dengan ketiga masalah tersebut di Kabupaten Rembang. Data yang disajikan merupakan hasil penghitungan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan PDRB Tahun 2016. Agar dapat diamati perkembangannya, maka ditampilkan pula data series dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan sebagian kebutuhan data, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan dapat terpenuhi. Semoga publikasi ini bermanfaat, terutama bagi pengambil kebijakan dan semua pihak yang berkepentingan. Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini diterbitkan diucapkan terimakasih.

Rembang, Nopember 2017

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REMBANG
KEPALA,

Amirudin, S.Si, MMSI

DAFTAR ISI

Abstrak	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	1
1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	5
2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5
2.2. Definisi Kemiskinan	6
2.2.1. Jenis-jenis Kemiskinan	6
2.2.2. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran	9
2.3. Distribusi Pendapatan	10
2.3.1. Teori Pareto	11
2.3.2. Indeks Theil dan Indeks-L	12
2.3.3. Teori Gini Ratio	13
2.3.4. Kriteria Bank Dunia	15
2.4. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan	16
BAB III. METODOLOGI	17
3.1. Metode Penghitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	17
3.2. Metode Penghitungan Kemiskinan	18
3.3. Teoro Gini Ratio	24
BAB IV. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG.....	27
4.1. Struktur Perekonomian Kabupaten Rembang	27
4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang	28
4.3. PDRB Per Kapita Kabupaten Rembang	30

BAB V. DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN REMBANG ...	33
BAB VI. KEMISKINAN DI KABUPATEN REMBANG	35
6.1. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang	35
6.2. Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang.....	37
6.3. Ukuran Indeks Kemiskinan di Kabupaten Rembang	39
BAB VII. KETERKAITAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN	41
7.1. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	41
7.2. Hubungan antara Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan.....	42
BAB VIII. PENUTUP	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2012-2016 (persen)	28
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2012-2016 (persen)	29
Tabel 4.3	PDRB Per Kapita adh Berlaku dan Konstan Kabupaten Rembang, 2012-2016	30

<https://rembangkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	<i>Gini Ratio</i> Kabupaten Rembang, 2011-2015	33
Gambar 6.1	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang, 2012-2016	35
Gambar 6.2	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016	36
Gambar 6.3	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang, 2012-2016 (Rp)	37
Gambar 6.4	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016	38
Gambar 6.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Rembang, 2012-2016.....	40
Gambar 7.1	Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2012-2016	41
Gambar 7.2	Persentase Penduduk Miskin dan Gini Rasio Kabupaten Rembang, 2011-2015	42

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.	PDRB Seri 2010 Adh Berlaku dan Konstan Menurut Lapangan Usaha serta Perkembangannya di Kabupaten Rembang, 2012-2016	51
Tabel 2.	Distribusi PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2012-2016 (persen)	52
Tabel 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2012-2016 (persen)	53
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang, 2011-2016.....	54
Tabel 5.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2014	55
Tabel 6.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015	56
Tabel 7.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah persoalan sosial ekonomi mendasar yang menjadi fokus dan perhatian utama Pemerintah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Rembang. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan Pemerintah, namun pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di sebuah negara tidak terlepas dari strategi pembangunan yang diterapkan. Pembangunan ekonomi dengan strategi pertumbuhan banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Strategi pembangunan dilaksanakan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan. Akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum diikuti penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dan ada indikasi melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi pembangunan yang diambil kurang tepat sasaran, sehingga hasilnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Oleh karena itu upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan upaya pemerataan dalam distribusi pendapatan perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan supaya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini antara lain untuk :

- a. Melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
- b. Melihat hubungan antara distribusi pendapatan dan kemiskinan

1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk kemiskinan dan distribusi pendapatan merupakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan data PDRB tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Rembang.

Dalam penulisan ini disajikan juga series data, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan yang terjadi di Kabupaten Rembang. Dengan tersedianya series data tersebut, perencana dan pengambil kebijakan program pembangunan di Kabupaten Rembang dapat menyusun program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan lebih baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun dalam 8 (delapan) bab, yaitu :

- Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan sumber data serta sistematika penulisan.
- Bab II. Kajian Pustaka**, merupakan kajian literatur/pustaka yang menjelaskan konsep PDRB, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, distribusi pendapatan dan kaitan antara ketiga aspek tersebut yang sudah dipublikasikan.
- Bab III. Metodologi**, menjelaskan tentang metode penghitungan pertumbuhan ekonomi, indikator kemiskinan yang mencakup tentang persentase penduduk miskin, ukuran kedalaman kemiskinan, ukuran keparahan kemiskinan dan distribusi pendapatan serta konsep dari beberapa istilah.
- Bab IV. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang**, membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Kabupaten Rembang.
- Bab V. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Rembang**, menjelaskan tentang ukuran distribusi pendapatan antar golongan pendapatan yang diukur dengan *Gini Ratio*.
- Bab VI. Kemiskinan di Kabupaten Rembang**, membahas tentang perkembangan kemiskinan, garis kemiskinan dan ukuran indeks kemiskinan di Kabupaten Rembang.

- Bab VII. Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan,** membahas keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan antara distribusi pendapatan dan kemiskinan.
- Bab VIII. Penutup,** berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan penutup.

<https://rembangkab.bps.go.id>

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB adhb (atas dasar harga berlaku) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (*region*). Yang dimaksud dengan **Nilai Tambah** yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

PDRB adhk (atas dasar harga konstan) adalah cerminan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang dinilai atas dasar harga pada tahun dasar. Dari segi metode statistik, suatu nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan beberapa cara, sedangkan pemakaiannya sangat tergantung dari data yang tersedia di masing-masing sektor/sub sektornya.

PENDAPATAN PERKAPITA (*INCOME PER CAPITA*)

Bila pendapatan-pendapatan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka akan diperoleh suatu pendapatan perkapita,

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian ekonomi makro adalah pertumbuhan PDB secara riil, yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi dimana produk domestik regional bruto mengalami peningkatan (Winardi, 2010). Pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional diukur dengan kenaikan PDB, sedangkan untuk tingkat daerah diukur dengan peningkatan PDRB. Pada dasarnya kedua hal tersebut tidak berbeda, hanya saja skala perhitungan yang mencakup daerah atau nasional.

2.2. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a). Terpenuhinya kebutuhan pangan, (b). kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, pertanian, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c). rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan, (d). hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

2.2.1. Jenis-jenis Kemiskinan

a. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 40 persen dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "sepanjang masih ada kehidupan, orang miskin akan selalu hadir bersama kita".

Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh *Ravallion* (1998 : 26). Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan tetapi dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai

untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

b. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum dari kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut adalah “tetap/tidak berubah” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). *Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya dan jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut.* Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu : a) US \$ 1 per hari, dengan batasan ini diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 per hari yang diperkirakan lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

c. Terminologi Kemiskinan

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil. Tatanan yang tidak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Hal tersebut menyebabkan mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, Suku Tengger di Pegunungan Tengger Provinsi Jawa Timur, dan sebagainya.

Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya Suku Badui di Cibeo Banten Selatan, Suku Dayak di pedalaman Pulau Kalimantan, dan suku Kubu di Provinsi Jambi.

Soetandyo Wignjosebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakatnya itu dalam kenyataan akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh

determinan-determinan sosial-budayanya (seperti misalnya posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang dicapai dan dapat didayagunakan olehnya itu akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai surat nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

2.2.2. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran

Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981: 29), dipromosikan dan dipopulerkan oleh *International Labor Organisation* (ILO) pada tahun 1976 dengan judul “Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia”. Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Demikian pula kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, seperti misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya.

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah :

1. Menurut *United Nations* (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.
2. Menurut UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981:31), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) *personal consumption items* yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) *basic public services* yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
5. Menurut Hendra Esmara (1986: 320-321), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
6. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

2.3. Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan tidak terlepas atau sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Menurut *Kuncoro* (1997), kemiskinan dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu : pertama, *kemiskinan absolute*, dimana dengan pendekatan ini di identifikasikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. kedua, *kemiskinan relatif*, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan

pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Badan Pusat Statistik dalam “Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009” dan “Penghitungan dan Indikator Makro 2010”, untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan tersebut terdapat beberapa teori maupun ukuran yang digunakan, antara lain :

1. Teori Pareto
2. Indeks Theil dan Indeks-L
3. Indeks *Gini Ratio*
4. Kriteria Bank Dunia.

2.3.1. Teori Pareto

Vilfredo Pareto (1897) dalam Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009 (BPS, 2009), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^b}$$

dengan :

A = Jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar daripada X

X = Tingkat pendapatan tertentu dari keluarga atau individu yang bersangkutan

N = Jumlah penduduk total

b = Parameter yang nilainya antara 1 dan 2

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto, menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini selanjutnya dikenal sebagai *Pareto Law*, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

2.3.2. Indeks Theil dan Indeks-L

Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik. Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famili ukuran ketimpangan “*generalized entrophy*”. Rumus “*generalized entrophy*” secara umum dapat ditulis sebagai berikut :

$$GE \alpha = \frac{1}{\alpha} \frac{1}{\alpha - 1} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{y}^\alpha - 1$$

y adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran).

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter α dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas dari distribusi (penduduk kaya). Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

a. GE (1) disebut sebagai Indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE 1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{y} \ln \frac{y_i}{y}$$

b. GE (0), juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata (*mean log deviation*) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari log (y):

$$GE 0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \frac{y}{y_i}$$

2.3.3. Teori *Gini Ratio*

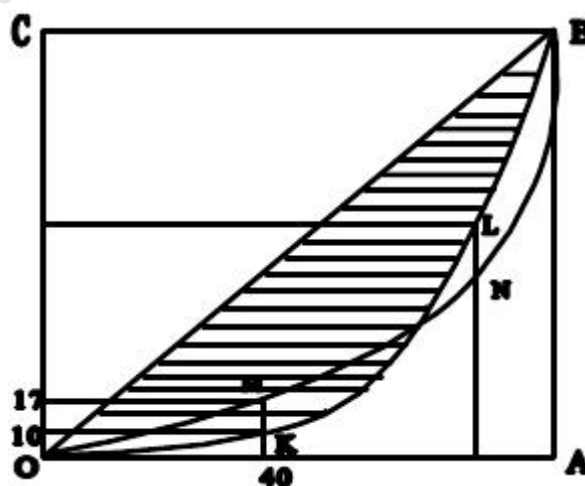
Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut :

- Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0,35$
- Ketimpangan taraf sedang, bila G antara $0,35 - 0,5$
- Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0,5$

Nilai Indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun Indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran.

Gambar 1. Kurva Lorenz



Keterangan :

- Sumbu OA menyatakan persentase jumlah penduduk.
- Sumbu OC menyatakan persentase pendapatan.

Titik K pada kurva OKLB menunjukkan 40 persen jumlah penduduk menerima pendapatan sebesar 10 persen total pendapatan. Sedang titik M pada kurva OMNB menggambarkan bahwa 40 persen jumlah penduduk menerima bagian pendapatan sebesar 17 persen dari total pendapatan. Berarti distribusi pendapatan yang digambarkan oleh kurva OMNB lebih merata dari pada distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh kurva OKLB.

Kelemahan *Gini Ratio* adalah besarnya nilai *Gini Ratio* tidak bisa menjelaskan letak ketimpangannya. Penjelasan ini dapat diilustrasikan dengan membuat kurva OMNB yang nilai *Gini Ratio*-nya dibuat sama dengan kurva OKLB. Dalam kurva (yang diarsir) golongan bawah lebih menderita dibandingkan kurva OMNB karena persentase yang diterima oleh 40 persen penduduk hanya 10 persen pendapatan, sedang pada kurva OKLB 40 persen penduduk menerima bagian 17 persen dari total pendapatan. Untuk mengatasi kelemahan ini para pakar menganjurkan agar ukuran ini dilengkapi dengan ukuran lain seperti Kriteria Bank Dunia, sehingga diketahui keadaan penduduk kelas bawah atau kelas atas yang timpang.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) dalam Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009 (BPS, 2009) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- a. Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.
- b. Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- a. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- b. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.

- c. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- d. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- a. Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total Koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai Indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (*sub-group*).

- b. Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap interval* (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

2.3.4. Kriteria Bank Dunia

Pada prinsipnya Kriteria Bank Dunia membagi penduduk ke dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan, yaitu 40 persen kelompok penduduk berpendapatan rendah, 40 persen kelompok penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen kelompok berpendapatan tinggi. Pengelompokan seperti ini pada dasarnya sama dengan menggunakan cara desil (*decile*), yaitu 40 persen pertama sama dengan desil ke-4; 40 persen kedua sama dengan desil ke-8 dan 20 persen terakhir adalah desil ke-10.

Kriteria ketimpangan diukur berdasarkan bagian pendapatan yang diterima kelompok berpendapatan rendah. Jika bagian pendapatan yang diterima kelompok ini :

- a. **Kurang dari 12 persen**, maka dapat diartikan bahwa tingkat pemerataan penduduk dalam kategori pemerataan rendah/ketimpangan tinggi,

- b. **12 persen - 17 persen**, maka dapat diartikan bahwa tingkat pemerataan penduduk dalam kategori pemerataan/ketimpangan sedang,
- c. **Di atas 17 persen**, maka dapat diartikan bahwa tingkat pemerataan penduduk dalam kategori pemerataan tinggi/ketimpangan rendah.

2.4. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak pada penurunan kemiskinan karena berbagai alasan. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditopang oleh sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan kerja rendah, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi seperti ini umumnya lebih memberikan keberpihakan kepada pengembangan sektor-sektor tertentu sehingga mempersempit peluang berkembangnya sektor lain, yang pada akhirnya akan berakibat pada berkurangnya jenis lapangan kerja yang tersedia. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun ditopang oleh keberadaan industri milik negara yang memperoleh sejumlah proteksi tertentu juga tidak menjamin akan dapat menyelesaikan kemiskinan. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh industri canggih juga berpotensi untuk memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran jika struktur tenaga kerja yang ada didominasi oleh tenaga kerja berkemampuan rendah (*low skill labor*). *Keempat*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditunjang oleh kekuatan ekonomi yang bersifat terkonsentrasi juga tidak akan sanggup mengatasi masalah kemiskinan (Rajasa, 2007).

Menurut Bappenas (2004), kemiskinan dan ketimpangan merupakan konsep yang berbeda, tetapi keduanya seringkali digunakan bersamaan dalam analisis kemiskinan karena adanya keterkaitan yang erat antara keduanya. Kemiskinan mengacu pada kondisi keterbelakangan dalam berbagai bentuk (pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kapabilitas), sedangkan ketimpangan mengacu pada distribusinya di antara anggota suatu kelompok masyarakat dan daerah. Dalam banyak kasus kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi baik oleh struktural maupun natural. Karena itu, indikator kemiskinan dan ketimpangan seringkali digabungkan dalam analisis dan penilaian kemiskinan.

BAB III METODOLOGI

3.1. Metode Penghitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi

1. Pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun sektoral

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung laju pertumbuhan (*Rate of growth*) dapat dipakai formula sebagai berikut :

$$G = \left[\frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \right] \times 100$$

dimana : G : Laju pertumbuhan
 P_t : PDRB adhk tahun ke-t
 P_{t-1} : PDRB adhk sebelum tahun ke-t

2. Indikasi tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah

Tinggi rendahnya tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah dari besar kecilnya angka pendapatan per kapita, yang diukur dari pendekatan pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, formulasinya sebagai berikut :

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

Dengan laju pertumbuhan per kapita yang positif dan tingkat pendapatan yang meningkat dan mantap, maka hal tersebut menjadi indikasi kemakmuran masyarakat juga semakin meningkat.

3.2. Metode Penghitungan Kemiskinan

Dengan memperhatikan konsep dan definisi kemiskinan yang sangat luas, upaya untuk mengukur kemiskinan menjadi tidak mudah. Secara garis besar pengukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif biasanya menggunakan data pendapatan atau pengeluaran rata-rata perkapita, tergantung ketersediaan datanya. Pendekatan kualitatif dapat menggunakan indikator individu (angka kematian bayi, partisipasi sekolah, harapan hidup, dan sebagainya) atau indikator rumah tangga (kondisi rumah, proporsi pengeluaran makanan rumah tangga). Pengukuran kemiskinan yang paling banyak digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada data pendapatan/pengeluaran perkapita dan datanya diperoleh dari survei rumah tangga. Hasil pengukuran ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan kemiskinan seperti berapa jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu wilayah, bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu, bagaimana tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

BPS melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang di sajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret. Serta mulai tahun 2011 pengumpulan data Susenas dilakukan triwulanan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, *penduduk miskin* adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan (GK) merupakan

penjumlahan dari komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) sebagai berikut :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk setiap provinsi, daerah perkotaan dan pedesaan.

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 % penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara adalah Garis Kemiskinan periode lalu di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Penyertaan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke 52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

dengan :

GKM_{jp} = Garis kemiskinan makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

J = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

P = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKMj tersebut disertakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga *implicit* rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

dengan :

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k daerah j provinsi p.

\overline{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

dengan :

GKM_{jp} = Kebutuhan makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari atau garis kemiskinan makanan (GKM)

J = Daerah (perkotaan/perdesaan)

P = Provinsi p

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komodatif kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komodatif (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komodatif (kelompok pengeluaran) di pedesaan garis kemiskinan (GKMN) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data susenas, modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil survei paket komodatif kebutuhan dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per-komoditi non-makanan yang lebih rinci

dibandingkan data susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} \cdot V_{kjp}$$

dengan :

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah dan provinsi p (dari susenas modul konsumsi).

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).

K = Jenis komonditi makanan terpilih.

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

P = Povinsi (perkotaan atau perdesaan)

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan :

$$\% PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

dengan :

$\% PM_p$ = % Penduduk miskin di provinsi p.

PM_p = Jumlah penduduk miskin di provinsi p.

P_p = Jumlah penduduk di provinsi p.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level Nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin Provinsi atau :

$$PM_I = \sum_{p=1}^n PM_p$$

Dengan :

PM_I = Penduduk miskin Indonesia.

PM_p = Penduduk miskin provinsi p.

n = Jumlah provinsi.

Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\% PM_I = \frac{PM_I}{P_I}$$

dengan :

$\% PM_I$ = Persentase penduduk miskin (secara nasional).

PM_I = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).

P_I = Jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang dapat digunakan :

- Head count index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).
- Indeks kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty severity Index-P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Foster-Greer-Tyhorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dengan :

$\alpha = 0, 1, 2$

z = Garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head count Index* (P0), jika $\alpha=1$ diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan jika $\alpha=2$ disebut indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*).

Berdasarkan garis kemiskinan tingkat provinsi di atas, maka angka tersebut digunakan sebagai patokan sementara untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya. Penduduk yang berada dibawah kelas batas (kelas dimana garis kemiskinan GK berada) baik di Provinsi maupun di Kabupaten dihitung rata-rata pengeluarannya yaitu:

\bar{Y}_{px} = Pengeluaran perkapita untuk Provinsi, dan

\bar{Y}_{kx} = Pengeluaran perkapita untuk Kabupaten/Kotamadya.

Perbandingan keduanya dipakai sebagai pendekatan perbedaan harga barang konsumsi antar daerah yang dibayar penduduk dibawah percentil ke X, dengan asumsi bahwa paket (bundel) barang dan kualitas serta kuantitas antara provinsi dan kabupaten sama.

Rasio perbandingan harga antara provinsi dan kabupaten diperkirakan sebagai berikut :

$$R_{kx} = \frac{\bar{Y}_{kx}}{\bar{Y}_{px}}$$

R_{kx} akan sama dengan 1 (satu) apabila tingkat harga yang dibayar penduduk miskin di provinsi sama dengan tingkat harga di kabupaten. Bila rasio tersebut tidak sama dengan satu, berarti ada perbedaan tingkat harga yang dibayar penduduk miskin di kedua daerah tersebut. Selanjutnya garis kemiskinan di kabupaten dihitung menggunakan formula :

$$GK_{ko} = R_{kx} \cdot GK_{po}$$

dimana :

GK_{ko} = Garis kemiskinan kabupaten k

R_{kx} = Rasio rata-rata pengeluaran penduduk perkapita dibawah percentil ke x di Kabupaten k

GK_{po} = Garis kemiskinan provinsi p dibawah percentil ke x

3.3. Teori *Gini Ratio*

Nilai Indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i Q_i + Q_{i-1}}{10000}$$

dengan :

G = *Gini Ratio*

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i-1

k = Banyaknya kelas pendapatan

Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi adalah sebagai berikut :

- a. Ketimpangan taraf rendah/pemerataan tinggi, bila $G < 0,35$
- b. Ketimpangan taraf sedang/pemerataan sedang, bila G antara $0,35 - 0,5$
- c. Ketimpangan taraf tinggi/pemerataan rendah, bila $G > 0,5$

<https://rembangkab.bps.go.id>

BAB IV

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG

Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan, memperluas kesempatan kerja, mendorong kemakmuran dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan, maka diperlukan adanya alat yang dapat membantu memberikan gambaran tingkat keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi tersebut. Salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan adanya data tersebut dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu data PDRB dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan, analisa, dan evaluasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan untuk menentukan sasaran pembangunan.

4.1. Struktur Perekonomian Kabupaten Rembang

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, struktur perekonomian Kabupaten Rembang masih didominasi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal demikian menggambarkan keadaan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Rembang mendapatkan penghasilan atau bekerja di sektor tersebut. Namun dengan perkembangan yang terjadi saat ini, peranannya mulai mengalami penurunan seiring dengan semakin meningkatnya lapangan usaha yang lain, seperti lapangan usaha Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian serta Jasa Pendidikan, terutama dalam empat tahun terakhir (**Tabel 4.1**).

Tabel 4.1. Distribusi PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2012-2016 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,25	33,39	30,23	29,99	28,89
B	Pertambangan dan Penggalian	2,88	2,87	3,06	3,12	3,14
C	Industri Pengolahan	18,49	18,83	20,82	21,15	21,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,57	6,76	7,45	7,41	7,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,71	13,44	13,01	12,77	12,86
H	Transportasi dan Pergudangan	3,31	3,34	3,51	3,59	3,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,90	2,88	3,04	3,08	3,06
J	Informasi dan Komunikasi	1,08	1,04	1,04	1,02	1,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,13	4,20	4,24	4,22	4,31
L	Real Estate	0,93	0,89	0,89	0,90	0,90
M,N	Jasa Perusahaan	0,24	0,26	0,26	0,27	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,16	4,03	3,89	3,85	3,82
P	Jasa Pendidikan	4,39	5,08	5,44	5,47	5,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,09	1,16	1,22	1,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,77	1,78	1,86	1,84	1,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016

4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang

Pertumbuhan ekonomi secara agregat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Selama periode tahun 2012-2016 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2015 sempat mengalami peningkatan yang cukup tajam. Pada tahun 2012 pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 5,32 persen, dan mengalami percepatan pada tahun 2013 menjadi 5,43 persen. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2014 menjadi 5,15 persen, terendah selama periode tahun 2012-2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang kembali mengalami percepatan pada tahun 2015 menjadi 5,50 persen, yang merupakan pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2016 kembali mengalami perlambatan hingga hanya sebesar 5,23 persen.

Tabel 4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2012-2016 (persen)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,52	4,22	-5,62	4,16	1,63
B	Pertambangan dan Penggalian	4,22	5,58	6,51	4,03	6,30
C	Industri Pengolahan	11,03	9,88	15,20	7,66	7,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,30	10,21	5,30	2,59	6,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,16	-0,19	1,98	1,71	2,98
F	Konstruksi	6,15	-4,40	14,65	6,18	7,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,85	3,14	4,05	4,11	5,28
H	Transportasi dan Pergudangan	6,66	10,54	10,55	6,78	5,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,03	6,47	11,18	6,13	5,63
J	Informasi dan Komunikasi	9,73	10,09	17,16	7,27	7,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,99	5,63	6,22	4,46	6,77
L	Real Estat	3,90	4,70	6,38	6,18	5,78
M,N	Jasa Perusahaan	5,68	16,68	7,15	8,84	9,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	1,99	0,67	4,87	2,78
P	Jasa Pendidikan	16,69	15,97	14,86	6,81	7,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,97	8,42	14,97	9,75	9,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,68	7,86	9,38	4,07	8,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,32	5,43	5,15	5,50	5,23

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016

Perekonomian Kabupaten Rembang yang melambat pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 disebabkan dengan perlambatan yang cukup besar pada pertumbuhan lapangan usaha pertanian. Dengan porsi yang besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rembang (28,29 persen), lambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian cukup berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang secara keseluruhan.

4.3. PDRB per Kapita Kabupaten Rembang

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor perekonomian di suatu daerah, yang dihitung dari PDRB *adh berlaku* dan konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita dapat menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah, meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataannya.

Tabel 4.3. PDRB Per Kapita *adh Berlaku* dan Konstan Kabupaten Rembang, 2012-2016

Tahun	PDRB Per Kapita (Ribu Rp)	
	<i>Adh Berlaku</i>	<i>Adh Konstan</i>
(1)	(2)	(3)
2012	17.103,52	15.370,18
2013	18.790,70	16.063,22
2014	20.879,31	16.747,26
2015	22.448,60	17.526,02
2016	23.822,35	18.095,75

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016

Dari **Tabel 4.3** terlihat PDRB per kapita Kabupaten Rembang mengalami kenaikan tiap tahunnya selama kurun waktu 2012-2016. PDRB menurut harga berlaku tahun 2012 sekitar 17,10 juta rupiah dan terus meningkat hingga menjadi 23,82 juta rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2015 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Rembang mencapai 23,82 juta rupiah

pada tahun 2016. Sedangkan menurut harga konstan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Rembang meningkat dari 15,37 juta rupiah menjadi 18,10 juta rupiah.

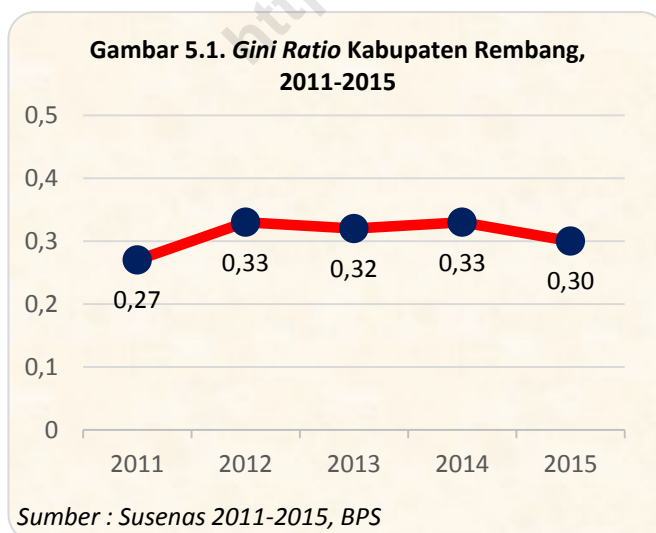
Meskipun perkembangan PDRB per kapita selalu mengalami kenaikan, yang berarti ada peningkatan pendapatan, namun belum dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk Kabupaten Rembang yang sebenarnya. Hal tersebut karena ada kepemilikan faktor produksi yang tidak hanya dimiliki oleh warga Rembang saja, tetapi sebagian juga dimiliki oleh penduduk di luar Kabupaten Rembang. Oleh karena itu PDRB per kapita Kabupaten Rembang belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Rembang.

<https://rembangkab.bps.go.id>

BAB V DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN REMBANG

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Pada pembahasan ini disajikan tingkat pemerataan pendapatan (distribusi pendapatan) yang direpresentasikan oleh *gini ratio*. Nilai Gini Rasio ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini Rasio menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Gini Rasio adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.



Secara umum angka Gini Rasio pada periode 2011-2015 di Kabupaten Rembang berfluktuasi. Pada periode tahun 2011-2012 terjadi kenaikan dari 0,27 pada tahun 2011 menjadi 0,33 pada tahun 2012. Setelah itu mengalami penurunan menjadi 0,32 pada tahun 2013, naik lagi pada tahun

2014 dan kembali menurun pada tahun 2015 menjadi 0,30. Fluktuasi angka Gini Rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk.

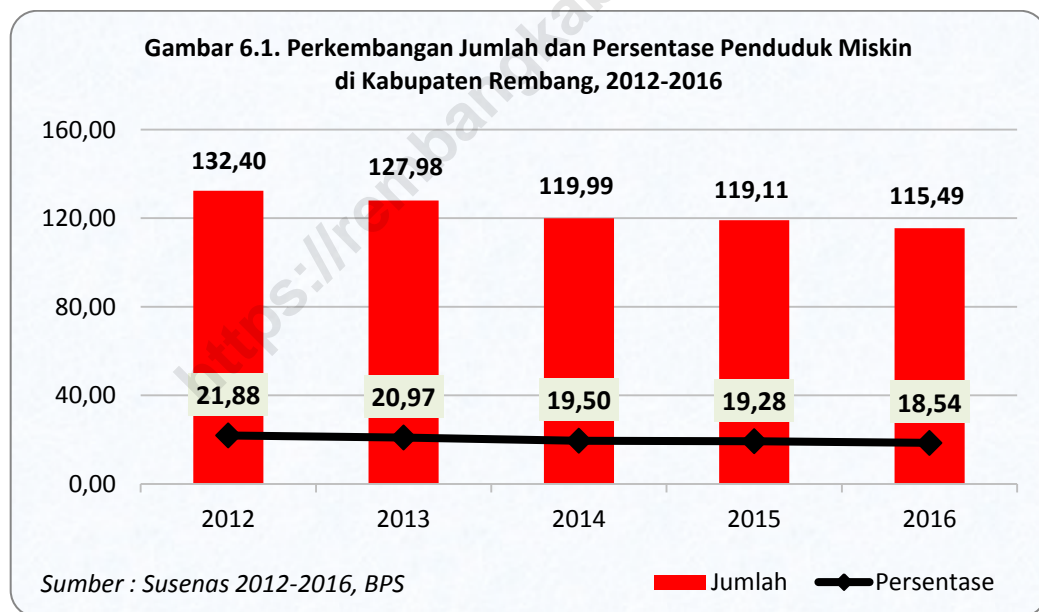
Penurunan angka Gini Rasio pada periode tahun 2014-2015 mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan distribusi pengeluaran penduduk pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, yang dapat diartikan juga bahwa pendapatan yang diterima masyarakat dari berbagai kelompok pendapatan relatif lebih merata atau terjadi tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang besarnya 0,27, hal tersebut masih mengkhawatirkan karena perbedaan pendapatan yang diterima masyarakat semakin melebar. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan merata.

<https://rembangkab.bps.go.id>

BAB VI KEMISKINAN DI KABUPATEN REMBANG

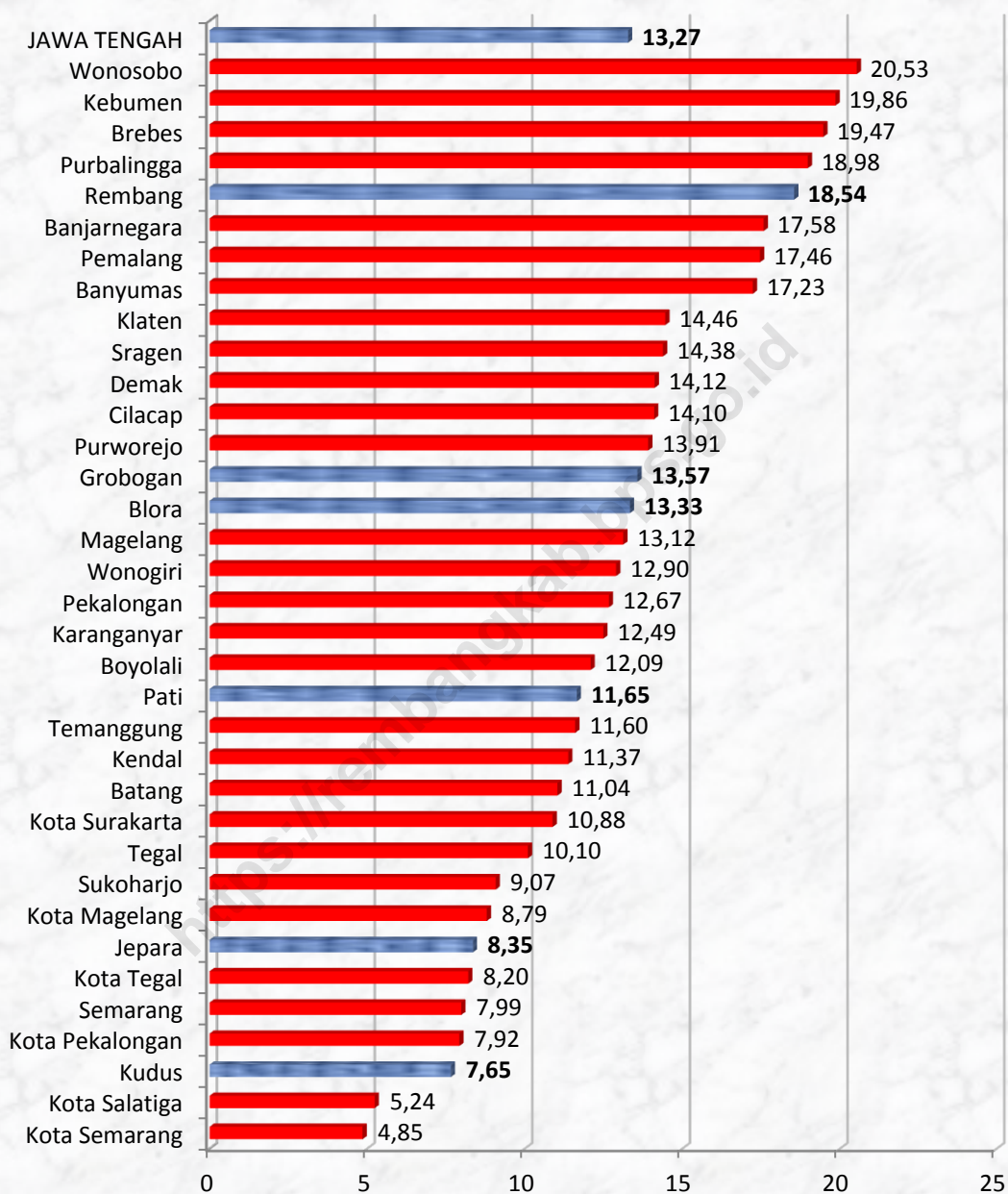
6.1. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang pada periode tahun 2012-2016 terlihat mempunyai kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada **Gambar 6.1** terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2012 sebanyak 132,40 ribu jiwa. Setelah itu jumlah penduduk miskin selama periode 2013-2016 terus mengalami penurunan hingga menjadi 115,49 ribu jiwa. Kondisi tersebut cukup menggembirakan, meskipun pada akhir Juni 2013 dan Nopember 2014 terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).



Perubahan jumlah penduduk miskin pada periode tahun 2012-2016 berpengaruh juga terhadap persentase penduduk miskin. Pada tahun 2012 persentase penduduk miskin di Kabupaten Rembang tercatat sebesar 21,88 persen. Setelah itu antara tahun 2013-2016 terus mengalami penurunan hingga menjadi 18,24 persen dari jumlah penduduk se-Kabupaten Rembang.

Gambar 6.2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, 2016



Sumber : Susenas 2016, BPS

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Propinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang (18,54 persen) pada tahun 2016 berada di peringkat 5 (lima) tertinggi dari 35 kabupaten/kota, setelah Kabupaten Wonosobo (20,45 persen), Kabupaten Kebumen (19,86 persen), Kabupaten Brebes (19,47 persen) dan Kabupaten Purbalingga (18,98 persen). Posisi lima kabupaten tersebut tidak

berubah dibandingkan tahun 2015. Sedangkan kabupaten/kota yang terendah persentase penduduk miskinnya adalah Kota Semarang (4,85 persen), kemudian diikuti Kota Salatiga (5,24 persen) dan Kabupaten Kudus (7,65 persen), yang peringkatnya sama dengan tahun sebelumnya.

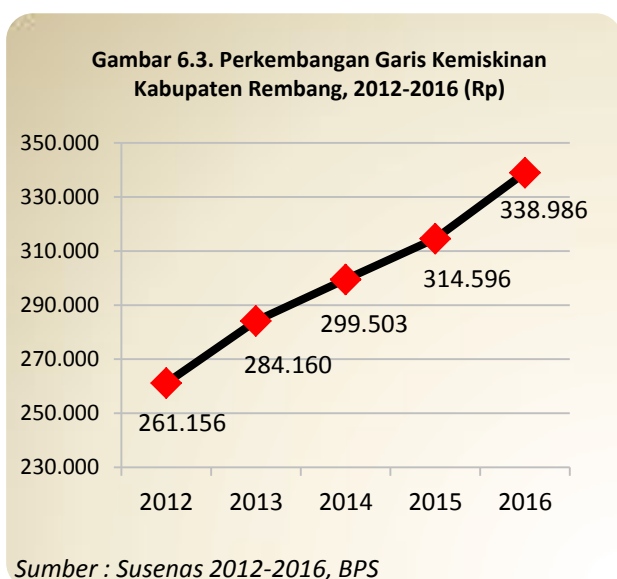
Untuk Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 13,27 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang besarnya 13,58 persen. Terlihat juga pada **Gambar 6.2** bahwa dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdapat 15 kabupaten/kota yang persentase penduduk miskinnya lebih tinggi dari angka Provinsi, sedangkan tahun sebelumnya tercatat hanya 14 kabupaten/kota.

Di wilayah eks-Karesidenan Pati, Kabupaten Rembang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi dibanding kabupaten lainnya. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah tercatat di Kabupaten Kudus (7,65 persen), diikuti Kabupaten Jepara sebesar 8,35 persen. Sementara itu persentase penduduk miskin Kabupaten Pati, Blora dan Grobogan berkisar antara 11-14 persen.

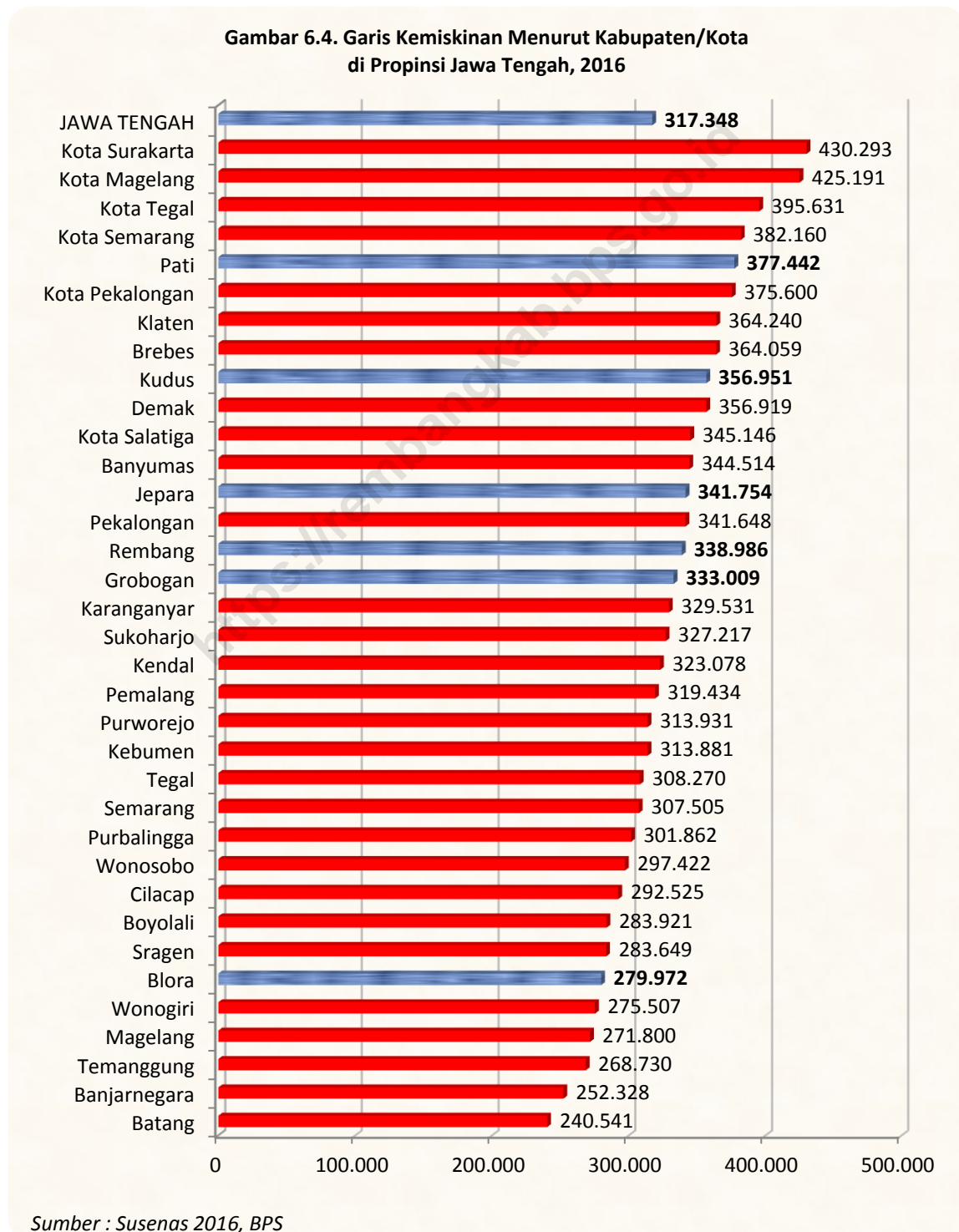
6.2. Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang

Garis kemiskinan adalah batasan untuk mengetahui miskin atau tidaknya seseorang. Seseorang yang mempunyai pendapatan yang lebih kecil dari garis kemiskinan, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang miskin dan sebaliknya.

Perkembangan garis kemiskinan pada periode tahun 2012-2016 terlihat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2012-2016 garis kemiskinan Kabupaten Rembang mengalami kenaikan sebesar 77.830 rupiah/kapita/bulan, yaitu dari 261.156 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2012 menjadi 338.986 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2016.



Garis kemiskinan tidak selalu tetap pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena memang trend kebutuhan hidup manusia akan berubah setiap saat. Mencermati dari **Gambar 6.3**, juga bisa diartikan bahwa besarnya konsumsi per kapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2012 maksimal sebesar 261.156 rupiah dan pada tahun 2016 mengalami perubahan menjadi 338.986 rupiah.



Pada tahun 2016, garis kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah terdapat di Kota Surakarta yaitu sebesar 430.293 rupiah/kapita/bulan, diikuti oleh Kota Magelang (425.191 rupiah/kapita/bulan) dan Kota Tegal (395.631 rupiah/kapita/bulan). Sedangkan Kabupaten Rembang sendiri menempati peringkat ke-15. Sementara itu garis kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Batang sebesar 240.541 rupiah/kapita/bulan. Untuk Provinsi Jawa Tengah, garis kemiskinannya sebesar 317.348 rupiah/kapita/bulan (**Gambar 6.4**).

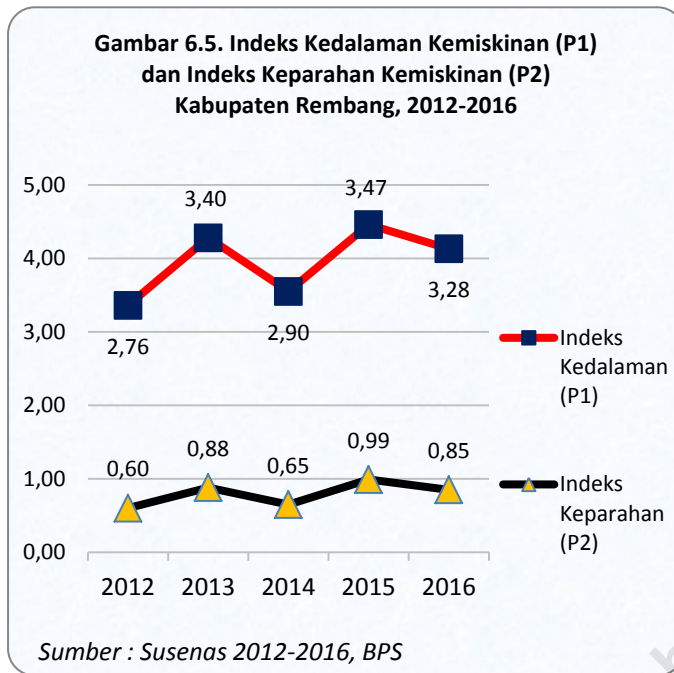
Di wilayah Eks-Karesidenan Pati, garis kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Pati, yaitu sebesar 377.442 rupiah/kapita/bulan, diikuti Kabupaten Kudus sebesar 356.951 rupiah/kapita/bulan. Selanjutnya berturut-turut Kabupaten Jepara, Rembang, Grobogan dan yang terendah adalah Kabupaten Blora. Bahkan hanya Kabupaten Blora yang memiliki garis kemiskinan di bawah 300.000 rupiah/kapita/bulan di wilayah Eks-Karesidenan Pati.

6.3. Ukuran Indeks Kemiskinan di Kabupaten Rembang

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tingkat kedalaman kemiskinan diukur dari indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap/P1*), sedangkan tingkat keparahan kemiskinan diukur dari indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity/P2*). Ukuran P1 menunjukkan adanya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilainya, maka penduduk miskin ini semakin menjauhi garis kemiskinan tersebut. Sedangkan ukuran P2 menunjukkan adanya penyebaran pengeluaran dari penduduk. Semakin tinggi nilai dari indeks ini, maka diantara penduduk miskin terjadi kesenjangan yang semakin melebar.

Selama periode tahun 2012-2016 perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami fluktuatif. Pada tahun genap P1 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun ganjil selalu mengalami kenaikan dari tahun



sebelumnya. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 3,40, P1 turun pada tahun 2014 menjadi 2,90. P1 kembali naik pada tahun 2015 menjadi 3,47, paling tinggi selama lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin menjauhi garis kemiskinan. Hal tersebut berarti tingkat perekonomian penduduk miskin

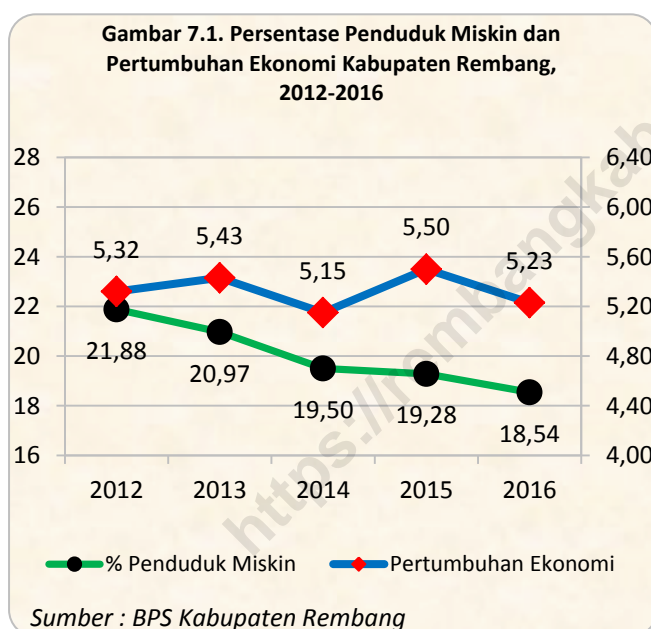
di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan dari tahun 2014. Namun, pada tahun 2016 P1 kembali mengalami penurunan menjadi 3,28, yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2016 cenderung makin mendekati garis kemiskinan dibanding tahun sebelumnya, yang berarti perekonomian penduduk miskin semakin membaik.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami perkembangan yang fluktuatif pada periode tahun 2012-2016. Polanya pun tidak berbeda jauh dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 0,88, P2 turun pada tahun 2014 menjadi 0,65. P2 kembali mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 0,99 persen, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang semakin melebar. P2 tahun 2015 merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Seperti P1, pada tahun 2016 P2 mengalami penurunan menjadi 0,85. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2016 semakin menyempit dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB VII
KETERKAITAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI,
KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

7.1. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat penting untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, walaupun tidak dapat berdiri sendiri untuk mengentaskan kemiskinan. Pada **Gambar 7.1** terlihat bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang antara tahun 2012-2013 mengalami percepatan dari



5,32 persen menjadi 5,43 persen, angka kemiskinannya menurun dari 21,88 persen menjadi 20,97 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada periode tersebut dapat mengurangi kemiskinan. Tetapi ketika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang mengalami perlambatan dari 5,43 persen pada tahun 2013 menjadi 5,15 persen pada tahun

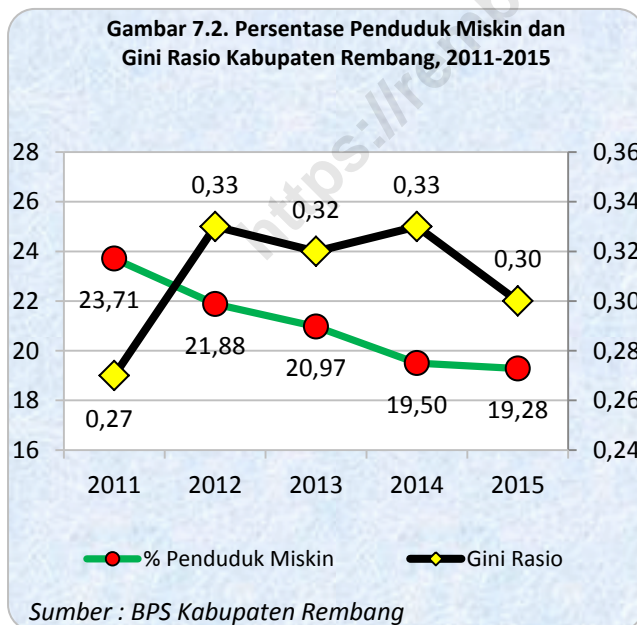
2014, persentase penduduk miskin masih melanjutkan tren penurunannya dari 20,97 persen menjadi 19,50 persen. Angka kemiskinan semakin turun pada tahun 2015 menjadi 19,28 persen, ketika pertumbuhan ekonomi kembali mengalami percepatan hingga mencapai 5,50 persen, tertinggi pada periode yang sama. Namun, ketika pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan pada tahun 2016 menjadi 5,23 persen, angka kemiskinan masih tetap turun hingga menjadi 18,54 persen, terendah selama lima tahun terakhir.

Meskipun pada periode tahun 2013-2014 dan tahun 2015-2016 terjadi anomali, secara umum hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di Kabupaten Rembang pada periode tahun 2012-2016 sejalan dengan teori dasar

ekonomi, yaitu bila pertumbuhan ekonomi membaik, maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan. Dan yang lebih menggembirakan lagi adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) tahun 2016 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yang berarti tingkat perekonomian penduduk miskin semakin membaik dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin menyempit. Tetapi hal yang patut diwaspadai adalah kemungkinan naiknya kembali P1 dan P2 pada tahun berikutnya, mengingat perkembangannya yang fluktuatif selama lima tahun terakhir.

7.2. Hubungan antara Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan suatu masyarakat erat hubungannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan (Darwis dan Nurmanaf, 2001). Distribusi pendapatan suatu daerah dapat menentukan bagaimana pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat khususnya dalam mengurangi kemiskinan. Distribusi pendapatan yang tidak merata



tidak akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat umum, tetapi hanya akan dinikmati oleh segelintir golongan tertentu saja.

Perkembangan kemiskinan dan tingkat ketimpangan pendapatan (direpresentasikan oleh gini rasio) periode 2011-2015 disajikan pada **Gambar 7.2**. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa hubungan yang

searah terjadi pada periode tahun 2012-2013 dan 2014-2015. Pada periode tersebut terjadi penurunan gini rasio yang diikuti oleh penurunan insiden kemiskinan. Pada periode tahun 2012-2013 gini rasio menurun dari 0,33 pada tahun 2012 menjadi 0,32 pada tahun 2013 dan sejalan dengan itu terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 21,88 persen (2012) menjadi 20,97 persen (2013). Sementara itu pada periode

tahun 2014-2015 gini rasio menurun dari 0,33 menjadi 0,30 dan terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,50 persen menjadi 19,28 persen.

Sedangkan pada periode tahun 2011-2012 dan 2013-2014 terdapat hubungan yang terbalik antara kemiskinan dan distribusi pendapatan. Pada periode 2011-2012, persentase penduduk miskin turun dari 23,71 persen menjadi 21,88 persen, padahal gini rasio naik dari 0,27 menjadi 0,33. Hal yang sama terjadi pada periode 2013-2014, persentase penduduk miskin turun dari 20,97 persen menjadi 19,50 persen pada saat gini rasio naik dari 0,32 menjadi 0,33. Dari kejadian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kemiskinan dan distribusi pendapatan, yang ketimpangannya masih tergolong rendah pada periode tahun 2011-2015, tidak selalu berjalan searah.

BAB VIII

PENUTUP

Secara umum tingkat perekonomian Kabupaten Rembang selama periode tahun 2012-2016 menunjukkan perkembangan yang kurang baik, karena melambatnya pertumbuhan ekonomi pada akhir periode. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan yang tergolong rendah dan angka kemiskinan yang terus mengalami penurunan merupakan kabar yang cukup menggembirakan. Namun masih ada beberapa hal yang dapat dijadikan catatan, antara lain :

1. Pada periode tahun 2013-2014 dan tahun 2015-2016 sempat terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi angka kemiskinan tetap menurun. Meskipun demikian, secara umum percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang selama periode tahun 2012-2016 dari 5,32 persen menjadi 5,23 persen dapat menjadi salah satu penyebab turunnya angka kemiskinan dari 21,88 persen menjadi 18,54 persen.
2. Hubungan antara distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2011-2015 tidak selalu berjalan searah. Pada periode tahun 2011-2012 dan 2013-2014 kemiskinan tetap menurun ketika ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan.

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah utama yang perlu ditangani lebih serius oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, meskipun tingkat perekonomian penduduk miskin semakin membaik dan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin semakin menyempit pada tahun 2016. Hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Kebijakan pembangunan yang menjadikan distribusi pendapatan yang merata dan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas penting dalam pembangunan merupakan hal yang sangat positif. Diperlukan program jangka pendek dan jangka panjang yang cerdas dari semua unsur pemerintahan yang ada untuk kelancaran dan

kemudahan dalam membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya. Selain itu, penduduk miskin juga perlu disertakan dan diberdayakan dalam berbagai program pengentasan kemiskinan.

<https://rembangkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS), 2011, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2011*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2009, *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2016) Pedoman Pencacahan*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2017. *Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2011-2015*. Semarang : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2017. *PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*. Rembang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2016. *Analisis Kemiskinan Kabupaten Rembang 2015*. Rembang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.

LAMPIRAN

<https://repositori.bptspangkab.bps.go.id>

Tabel 1. PDRB Seri 2010 adh Berlaku dan Konstan Menurut Lapangan Usaha serta Perkembangannya di Kabupaten Rembang, 2012-2016

Tahun	PDRB adh Berlaku		PDRB adh Konstan	
	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	10.323.373,92	10,38	9.277.163,23	5,32
2013	11.441.103,05	10,83	9.780.750,39	5,43
2014*	12.821.715,64	12,07	10.284.274,36	5,15
2015**	13.897.816,54	8,39	10.850.269,20	5,50
2016***	14.867.075,74	6,97	11.418.008,73	5,23

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Seri 2010)

Keterangan : * Angka diperbaiki

** Angka sementara

*** Angka sangat sementara

Tabel 2. Distribusi PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2012-2016 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014*	2015**	2016***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,25	33,39	30,23	29,99	28,89
B	Pertambangan dan Penggalian	2,88	2,87	3,06	3,12	3,14
C	Industri Pengolahan	18,49	18,83	20,82	21,15	21,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,57	6,76	7,45	7,41	7,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,71	13,44	13,01	12,77	12,86
H	Transportasi dan Pergudangan	3,31	3,34	3,51	3,59	3,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,90	2,88	3,04	3,08	3,06
J	Informasi dan Komunikasi	1,08	1,04	1,04	1,02	1,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,13	4,20	4,24	4,22	4,31
L	Real Estate	0,93	0,89	0,89	0,90	0,90
M,N	Jasa Perusahaan	0,24	0,26	0,26	0,27	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,16	4,03	3,89	3,85	3,82
P	Jasa Pendidikan	4,39	5,08	5,44	5,47	5,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,09	1,16	1,22	1,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,77	1,78	1,86	1,84	1,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Seri 2010)

Keterangan : * Angka diperbaiki

** Angka sementara

*** Angka sangat sementara

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2012-2016 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014*	2015**	2016***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,52	4,22	-5,62	4,16	1,63
B	Pertambangan dan Penggalian	4,22	5,58	6,51	4,03	6,30
C	Industri Pengolahan	11,03	9,88	15,20	7,66	7,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,30	10,21	5,30	2,59	6,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,16	-0,19	1,98	1,71	2,98
F	Konstruksi	6,15	-4,40	14,65	6,18	7,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,85	3,14	4,05	4,11	5,28
H	Transportasi dan Pergudangan	6,66	10,54	10,55	6,78	5,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,03	6,47	11,18	6,13	5,63
J	Informasi dan Komunikasi	9,73	10,09	17,16	7,27	7,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,99	5,63	6,22	4,46	6,77
L	Real Estat	3,90	4,70	6,38	6,18	5,78
M,N	Jasa Perusahaan	5,68	16,68	7,15	8,84	9,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	1,99	0,67	4,87	2,78
P	Jasa Pendidikan	16,69	15,97	14,86	6,81	7,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,97	8,42	14,97	9,75	9,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,68	7,86	9,38	4,07	8,30
Produk Domestik Regional Bruto		5,32	5,43	5,15	5,50	5,23

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Seri 2010)

Keterangan : * Angka diperbaiki

** Angka sementara

*** Angka sangat sementara

Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang, 2011-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	140,38	23,71	2,86	0,58	240.859
2012	132,40	21,88	2,76	0,60	261.156
2013	127,98	20,97	3,40	0,88	284.160
2014	119,99	19,50	2,90	0,65	299.503
2015	119,11	19,28	3,47	0,99	314.596
2016	115,49	18,54	3,28	0,85	338.986

Sumber : Susenas 2011-2016, BPS

Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2014

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3301	Cilacap	239,75	14,21	2,37	0,61	265.714
3302	Banyumas	283,48	17,45	2,48	0,56	309.106
3303	Purbalingga	176,04	19,75	3,26	0,80	275.022
3304	Banjarnegara	159,48	17,77	2,88	0,73	229.718
3305	Kebumen	242,31	20,50	2,78	0,61	277.280
3306	Purworejo	102,11	14,41	1,85	0,42	284.409
3307	Wonosobo	165,83	21,42	3,91	1,09	267.548
3308	Magelang	160,48	12,98	2,07	0,47	246.292
3309	Boyolali	118,58	12,36	1,62	0,32	255.391
3310	Klaten	168,18	14,56	2,02	0,45	327.231
3311	Sukoharjo	78,85	9,18	0,76	0,14	291.949
3312	Wonogiri	123,85	13,09	1,65	0,34	244.761
3313	Karanganyar	107,29	12,62	2,02	0,48	288.814
3314	Sragen	130,28	14,87	2,04	0,45	255.550
3315	Grobogan	186,53	13,86	2,33	0,59	290.827
3316	Blora	115,98	13,66	2,09	0,50	248.903
3317	Rembang	119,99	19,50	2,90	0,65	299.503
3318	Pati	148,05	12,06	1,54	0,32	332.228
3319	Kudus	65,80	7,99	0,90	0,15	314.211
3320	Jepara	100,48	8,55	1,17	0,23	299.914
3321	Demak	161,95	14,60	1,90	0,40	315.570
3322	Semarang	79,76	8,05	1,20	0,29	275.612
3323	Temanggung	85,53	11,55	1,51	0,30	240.845
3324	Kendal	110,48	11,80	1,76	0,41	289.486
3325	Batang	82,12	11,13	1,43	0,29	216.952
3326	Pekalongan	109,27	12,57	1,79	0,42	306.281
3327	Pemalang	236,98	18,44	2,49	0,53	287.358
3328	Tegal	140,31	9,87	1,33	0,32	271.875
3329	Brebes	355,12	20,00	2,93	0,66	327.452
3371	Kota Magelang	11,02	9,14	0,94	0,20	376.143
3372	Kota Surakarta	55,92	10,95	1,48	0,30	385.467
3373	Kota Salatiga	10,79	5,93	0,87	0,21	320.204
3374	Kota Semarang	84,68	5,04	0,47	0,08	348.824
3375	Kota Pekalongan	23,62	8,02	1,14	0,26	338.398
3376	Kota Tegal	20,94	8,54	1,38	0,38	353.301
3300	JAWA TENGAH	4.561,83	13,58	2,09	0,51	281.570

Sumber : Susenas 2015, BPS

Tabel 6. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3301	Cilacap	243,47	14,39	2,71	0,76	273.828
3302	Banyumas	285,85	17,52	2,91	0,71	320.585
3303	Purbalingga	176,49	19,70	3,37	0,85	283.366
3304	Banjarnegara	165,36	18,37	3,51	0,93	236.399
3305	Kebumen	241,94	20,44	4,08	1,19	292.177
3306	Purworejo	101,25	14,27	2,43	0,63	294.158
3307	Wonosobo	166,41	21,45	4,74	1,60	275.180
3308	Magelang	162,38	13,07	1,60	0,32	253.866
3309	Boyolali	119,97	12,45	2,01	0,50	263.734
3310	Klaten	172,30	14,89	2,72	0,72	340.484
3311	Sukoharjo	79,94	9,26	1,09	0,25	303.030
3312	Wonogiri	122,98	12,98	2,10	0,50	252.903
3313	Karanganyar	106,43	12,46	1,82	0,40	303.056
3314	Sragen	130,42	14,86	2,69	0,76	263.199
3315	Grobogan	184,49	13,68	2,56	0,65	303.455
3316	Blora	115,05	13,52	2,08	0,54	257.581
3317	Rembang	119,11	19,28	3,47	0,99	314.596
3318	Pati	147,05	11,95	2,02	0,55	347.575
3319	Kudus	64,10	7,73	0,90	0,17	328.404
3320	Jepara	100,61	8,50	1,28	0,28	314.422
3321	Demak	160,89	14,44	2,32	0,60	328.529
3322	Semarang	81,25	8,15	1,33	0,30	286.918
3323	Temanggung	87,45	11,76	1,99	0,47	248.866
3324	Kendal	109,27	11,62	2,17	0,57	301.449
3325	Batang	83,53	11,27	1,80	0,43	224.437
3326	Pekalongan	112,07	12,84	1,98	0,46	317.796
3327	Pemalang	235,53	18,30	3,93	1,24	298.622
3328	Tegal	143,54	10,09	1,50	0,36	282.861
3329	Brebes	352,01	19,79	3,52	0,93	340.538
3371	Kota Magelang	10,92	9,05	1,39	0,31	405.228
3372	Kota Surakarta	55,71	10,89	1,74	0,40	406.840
3373	Kota Salatiga	10,62	5,80	1,07	0,26	337.511
3374	Kota Semarang	84,27	4,97	0,50	0,09	368.477
3375	Kota Pekalongan	24,06	8,09	0,83	0,15	352.717
3376	Kota Tegal	20,31	8,26	1,34	0,35	371.528
3300	JAWA TENGAH	4.577,04	13,58	2,44	0,65	297.851

Sumber : Susenas 2015, BPS

Tabel 7. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3301	Cilacap	240,24	14,12	2,58	0,70	292.525
3302	Banyumas	283,90	17,23	3,08	0,85	344.514
3303	Purbalingga	171,78	18,98	3,85	1,20	301.862
3304	Banjarnegara	158,20	17,46	3,03	0,80	252.328
3305	Kebumen	235,90	19,86	3,78	1,11	313.881
3306	Purworejo	99,07	13,91	2,67	0,76	313.931
3307	Wonosobo	160,12	20,53	4,02	1,11	297.422
3308	Magelang	158,86	12,67	1,84	0,44	271.800
3309	Boyolali	116,98	12,09	2,56	0,81	283.921
3310	Klaten	168,01	14,46	2,70	0,71	364.240
3311	Sukoharjo	78,91	9,07	1,36	0,29	327.217
3312	Wonogiri	124,83	13,12	1,68	0,38	275.507
3313	Karanganyar	107,66	12,49	2,09	0,51	329.531
3314	Sragen	126,76	14,38	2,92	0,99	283.649
3315	Grobogan	184,14	13,57	1,78	0,38	333.009
3316	Blora	113,94	13,33	2,17	0,54	279.972
3317	Rembang	115,49	18,54	3,28	0,85	338.986
3318	Pati	144,20	11,65	1,99	0,49	377.442
3319	Kudus	64,19	7,65	1,07	0,21	356.951
3320	Jepara	100,32	8,35	0,68	0,10	341.754
3321	Demak	158,84	14,10	2,20	0,56	356.919
3322	Semarang	80,72	7,99	1,57	0,45	307.505
3323	Temanggung	87,09	11,60	1,70	0,39	268.730
3324	Kendal	107,81	11,37	2,13	0,61	323.078
3325	Batang	82,56	11,04	1,65	0,39	240.541
3326	Pekalongan	113,31	12,90	1,94	0,49	341.648
3327	Pemalang	227,08	17,58	3,04	0,80	319.434
3328	Tegal	144,22	10,10	1,03	0,21	308.270
3329	Brebes	347,98	19,47	3,96	1,16	364.059
3371	Kota Magelang	10,64	8,79	1,20	0,23	425.191
3372	Kota Surakarta	55,91	10,88	1,34	0,35	430.293
3373	Kota Salatiga	9,73	5,24	0,60	0,11	345.146
3374	Kota Semarang	83,59	4,85	0,76	0,18	382.160
3375	Kota Pekalongan	23,65	7,92	0,80	0,13	375.600
3376	Kota Tegal	20,26	8,20	1,04	0,21	395.631
3300	JAWA TENGAH	4.506,89	13,27	2,37	0,63	317.348

Sumber : Susenas 2016, BPS

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Pemuda Km. 1 Rembang, 59218

Telp. dan Faks. (0295) 691040

Situs web : <http://rembangkab.bps.go.id>

Email : bps3317@bps.go.id